

Antara Percaya dan Tidak Percaya

Rhiza S. Sadjad

Mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Universitas Terbuka

Berbaurnya fakta, opini, narasi, fiksi dan halusinasi dalam selebaran yang beredar luas atau viral di media sosial, sering menempatkan khalayak *netizen* pada posisi yang membingungkan di antara percaya dan tidak percaya. Dalam posisi seperti itu, sebagian khalayak tanpa berfikir-panjang meneruskan dengan satu jarinya, sehingga semakin viral dengan sangat cepat dan menghasilkan kebingungan massal yang meluas. Para pakar menganjurkan agar khalayak melakukan “*check and recheck*” sebelum meneruskan ke tempat lain. Anjuran ini mudah diucapkan, tapi pada realitanya sulit dilaksanakan. Kasus “ijazah palsu” saja, contohnya, perlu bertahun-tahun untuk “*check and recheck*” dengan berbagai upaya yang melibatkan berbagai pihak, nyatanya belum selesai juga sampai sekarang.

Ada semacam “*golden rule*” untuk mengatasi persoalan antara percaya dan tidak percaya. Jika yang kita baca itu sesuatu yang baik, atau bisa mendatangkan kebaikan untuk kita, maka boleh langsung kita percayai saja, kemudian kita teruskan ke orang lain yang kita yakini akan mendapatkan kebaikan juga. Kita tetap percaya hal yang baik itu, sampai nanti ada fakta yang membuktikan bahwa sebenarnya hal itu tidak baik untuk kita. Sebaliknya, jangan kita langsung percaya begitu saja jika kita membaca suatu berita yang tidak baik. Jangan diteruskan ke tempat lain, sampai nanti ada fakta yang membuktikan bahwa sebenarnya hal itu adalah kebaikan. Contohnya, misalnya ada berita tidak baik: “Bupati X berhasil dilengserkan”. Jangan langsung percaya, apa lagi menyebarkannya ke media sosial. Nanti setelah ada konfirmasi (biasanya ada berita serupa di media cetak atau media elektronik) bahwa memang benar bupati X telah dilengserkan karena ditengarai telah melakukan korupsi yang merugikan rakyat di daerahnya, barulah kita percaya. Sebaliknya, jika misalnya ada berita baik: “Bupati X berhasil meraih penghargaan”, kita boleh langsung percaya dan meneruskannya ke media sosial, dan tetap kita percayai berita baik itu, kecuali ada berita lain yang meluruskan bahwa sesungguhnya yang mendapat penghargaan adalah bupati Y, bukan bupati X.

Seorang penulis kondang Amerika Serikat bernama *Noam Chomsky* pernah mengatakan dalam bukunya yang terkenal “*Manufacturing Consent*” [1988] pentingnya membangun yang disebutnya sebagai “*the intellectual self-defence*”, kemampuan bela-diri atau pertahanan intelektual. Kemampuan bela-diri fisik, seperti silat, kungfu, karate, yudo, dan lain-lain, diperlukan untuk mempertahankan diri dari serangan fisik. Kemampuan bela-diri intelektual yang digagas *Noam Chomsky* waktu itu bermanfaat dalam menghadapi indoktrinasi, agitasi, propaganda, bahkan “cuci otak” melalui media massa, yang umumnya dilakukan pemerintah suatu negeri pada rakyatnya. Pada era yang disebut era

post-truth (pasca-kebenaran) sekarang ini, kembali terasa pentingnya membangun kemampuan bela-diri intelektual, karena melalui media sosial, “serangan” muncul dari segala arah, bukan hanya dari negara seperti yang dilakukan sejak pertengahan abad ke-20 lalu dengan memanfaatkan media massa. Terbukti, misalnya, banyak pelaku kerusuhan pada akhir bulan Agustus 2025 lalu, mengaku mendapatkan “informasi” berupa ajakan – entah dari siapa – untuk melakukan kerusuhan melalui media sosial.

Sikap skeptisme sehat, yaitu percaya pada yang baik-baik saja, dan tidak percaya yang tidak baik, sampai fakta dan realita membuktikan sebaliknya, merupakan salah satu cara membangun pertahanan intelektual. Dalam perspektif keagamaan, rasa percaya atau tidak percaya itu dibangun berdasarkan tumbuhnya keyakinan. Pada tataran yang paling mendasar, kita meyakini suatu kebenaran, karena kita menyaksikan sendiri (*'ainal yaqin*) kebenaran itu, atau kita mempercayai orang yang menyaksikannya. Dalam sistem peradilan, orang yang bersaksi berdasarkan pengamatan inderawinya disebut “saksi mata”. Pada tataran berikutnya, yang disebut *'ilmal yaqin*, kita bisa meyakini suatu kebenaran, walau pun tidak menyaksikannya atau tidak disaksikan orang lain yang kita percaya, karena kita memiliki ilmu-pengetahuan dan teknologi untuk membangun keyakinan tersebut. Orang yang meyakini sesuatu dengan ilmu-pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya, disebut “saksi ahli” dalam sistem peradilan. Di atas *'ainal yaqin* dan *'ilmal yaqin* ada yang disebut *haqqul yaqin*, suatu kebenaran mutlak, yang berasal dari Tuhan. Dalam sistem peradilan, kebenaran mutlak ini ada dalam hati-nurani para hakim, yang biasa diberi kedudukan yang sangat tinggi, sebagai “wakil Tuhan”.

Ketiga tataran keyakinan itu dibangun bersama-sama untuk membentuk suatu pertahanan intelektual, sehingga secara intuitif kita bisa mengambil sikap percaya atau tidak percaya, tanpa harus terombang-ambing dalam kebingungan dan keraguan. Kesaksian inderawi saja tidak cukup, karena seringkali suatu berita sengaja di-bingkai (*di-framing*) sedemikian rupa sehingga mengarahkan khalayak agar tanpa disadari mendapat persepsi tertentu sesuai yang diinginkan. Apalagi sekarang ada teknologi “*deep fake*” untuk membuat rekaman video yang seakan-akan asli. Demikian juga, penguasaan ilmu-pengetahuan dan teknologi bisa saja di-salah-guna-kan untuk me-manipulasi fakta dan realita, sehingga terputar-balik sama-sekali. Kelemahan keyakinan pada kedua tataran tersebut sering menimbulkan yang disebut “*confirmation bias*”, yaitu seseorang mendapatkan konfirmasi dari apa yang sejak awal sudah diyakininya sebagai kebenaran. Kemampuan bela-diri intelektual yang paling sempurna adalah yang diluruskan oleh kebenaran hakiki yang ada dalam hati-nurani kita.